

02
04
10

GOVERNMENTTODAY
Prabowo Temui Putin, Ditawari Teknologi
Nuklir Rusia Lagi

NUSANTARA
Minta Proyek, Wakil Wali Kota Bandung Jadi
Tersangka Korupsi

LISTSTYLE
Normcore, Gaya 'Boring Fashion'
Masa Depan Mode Berkelanjutan

EDISI KAMIS, 11 DESEMBER 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

EMAS INDONESIA DARI BADMINTON BEREKU PUTRA

Klasemen medali SEA Games 2025 pada Rabu (10/12/2025) malam WIB mengalami perubahan signifikan. Kontingen Indonesia berada di posisi kedua usai merebut lima medali emas. Puncak klasemen medali SEA Games 2025 dikuasai Thailand yang total mengemas 41 medali. Tuan rumah sukses meraih 19 emas, 13 perak, dan sembilan perunggu. Sementara Indonesia berhak menempati posisi kedua setelah merebut lima emas, sembilan perak, dan tujuh perunggu. Salah satu medali emas diraih tim badminton beregu putra yang sukses menumpas Malaysia. Alwi Farhan dan kawan-kawan tampil impresif usai mengalahkan Malaysia 3-0 di Thailand, Rabu (10/12/2025). (ist.antara)



ISYARAT GAGALNYA KESEPAKATAN DAGANG RI-AS MENCUAT

Mendadak kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dikabarkan terancam gagal. Hal ini setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah RI yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025. Isyarat kandasnya deal tersebut diberitakan laman media asing The Financial Times, Reuters hingga Investing.com pada Rabu (10/12/2025). Bahkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan, Indonesia menjadi sedikit 'keras kepala'. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia pada pertengahan Juli, memangkas tarif "timbal balik" menjadi 19% dari 32% yang telah diancamnya dalam 'surat tarif' kepada negara tersebut pada awal bulan itu. Trump mengatakan bahwa Indonesia telah 'berkomitmen' untuk membeli produk energi AS senilai US\$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US\$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Presiden AS juga mengatakan pada saat itu bahwa "Ekspor AS ke Indonesia harus bebas dari hambatan tarif dan non-tarif". Pemerintahan Prabowo langsung membantah kabar itu. Ditegaskan, kesepakatan perdagangan tersebut masih tetap berlangsung dan tidak ada permasalahan yang menyebabkan perundingan terancam batal.

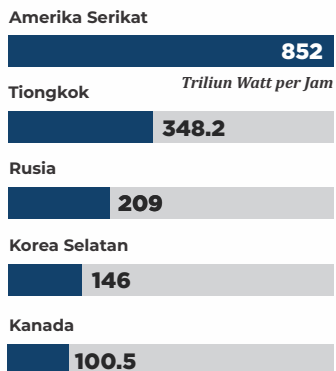
Pernyataan Bersama (Joint Statement) tentang Kerangka Kerja untuk Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS

- **Penurunan Tarif Ekspor Indonesia:**
Amerika Serikat menyetujui penurunan tarif untuk produk ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%.
- **Akses Pasar AS:**
Berdasarkan kesepakatan ini, produk Indonesia akan dikenakan tarif resiprok sebesar 19% saat memasuki pasar AS.
- **Akses Pasar Indonesia:**
Sebaliknya, Indonesia akan menghilangkan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri, pangan, dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.
- **Komitmen Non-Tarif:**
Kedua negara juga sepakat untuk mengatasi hambatan non-tarif, termasuk yang memengaruhi perdagangan dan investasi digital, serta berkomitmen untuk mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BACA HAL 11...



5 NEGARA DENGAN PEMANFAAT ENERGI NUKLIR UNTUK SUMBER LISTRIK TERBESAR (2019)



Sumber: databoks

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan banyak potensi kerja sama antara negaranya dengan Indonesia, salah satunya di bidang energi nuklir.

Hal itu disampaikan Putin saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).

"Kita memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu Anda jika Anda menganggap memungkinkan untuk melibatkan

PRABOWO TEMUI PUTIN, DITAWARI TEKNOLOGI NUKLIR RUSIA LAGI

Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan dukungan teknologi nuklir saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025). Ia menilai Indonesia nantinya bakal membutuhkan energi tersebut. Ini kali kedua Rusia menyinggung kerja sama nuklir dengan Indonesia. Tawaran pertama disampaikan Putin dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo di Istana Constantine atau Konstantinovskiy Rusia, Kamis, 19 Juni 2025 lalu.



Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025). (Dok. YouTube Setpres)

spesialis kami," kata Putin dalam pertemuan bilateral tersebut.

Putin menegaskan hubungan Rusia-Indonesia terus menunjukkan tren positif. Ia menyebut kedua negara memperingati 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini. Menurutnya, kedua negara menunjukkan kerja sama

ekonomi dan perdagangan yang meningkat.

"Komisi antar pemerintah aktif bekerja di kedua belah pihak. Hubungan perdagangan dan ekonomi berkembang dengan baik. Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 17 persen," ujar Putin.

Selain energi, Rusia juga membuka peluang kerja sama di sektor industri dan pertanian. Putin mengatakan kedua negara memiliki sejumlah proyek potensial yang bisa dikembangkan ke depan, termasuk peningkatan produk agrikultur Rusia ke Indonesia.

"Kita memiliki banyak proyek menarik di bidang kerja sama industri, serta di bidang pertanian. Kita bahkan memiliki surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia dalam hubungan pertanian kita," tutur Putin.

Rencana yang masih dikaji yakni pembangunan Small Modular Reactor (SMR) dengan modular 500 megawatt.

Rencana kerjasama tersebut saat ini masih pada tahap studi kelayakan.

Reaktor modular dikaji karena dianggap lebih efisien dan fleksibel apabila dibandingkan dengan pembangkit nuklir konvensional.

Presiden Putin juga menyoroti penurunan impor gandum ke Indonesia sebagai isu yang dapat dibahas lebih lanjut.

Kerja sama pertahanan disebut sebagai salah satu fondasi hubungan kedua negara, dengan banyak personel Indonesia yang telah dan terus menempuh pendidikan di institusi militer Rusia. Moskow menyatakan siap memperluas kerja sama tersebut.

Selain itu, hubungan antar-masyarakat pun meningkat. Jumlah wisatawan dari dan ke kedua negara semakin bertambah, didukung oleh penerbangan langsung serta kemudahan layanan visa.

Presiden Rusia juga menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS serta berlangsungnya pembahasan terkait pembentukan zona perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union).

Menutup pernyataannya, Presiden Rusia menegaskan bahwa agenda pembicaraan mencakup hampir seluruh sektor strategis, dan menyatakan kegembiraannya bisa menjamu langsung pemimpin Indonesia bersama delegasi besar Rusia yang siap berdiskusi secara mendalam.

Prabowo hadir bertemu dengan Putin didampingi oleh Menlu Sugiono dan Seskab Teddy Indra Wijaya usai kunjungan dari Pakistan. (gus,ist,afp/dya)

ESDM: Kerangka Hukum Nuklir RI Lengkap Sejak 6 Dekade Lalu

TENAGA Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Irwanuddin, mengatakan kerangka hukum terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia sudah lengkap sejak enam dekade lalu. Ia menyebut regulasi tersebut menjadi fondasi kuat pengembangan teknologi nuklir nasional.

Ia menerangkan landasan pengaturan nuklir telah dibangun sejak masa Presiden Soekarno melalui PP 65/1958 yang membentuk Dewan Tenaga Atom (DTA) dan Lembaga Tenaga Atom (LTA). Kerangka itu, jelas dia, diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Pokok-Pokok Ketenagaan Atom Nomor 31 Tahun 1964 yang menjadi tonggak utama sektor nuklir Indonesia.

"Perjalanan sejarah energi nuklir Indonesia itu bukan hal yang baru,"

kata Irwanuddin dalam acara Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ia melanjutkan, langkah-langkah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang sejak awal memiliki komitmen kuat di bidang teknologi nuklir. Pada 1958 Indonesia bahkan memimpin komite pertama penyusunan statuta pembentukan badan nuklir internasional dan hadir bersama 70 negara dalam forum PBB. Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno menetapkan dasar hukum pembentukan lembaga tenaga atom nasional.

Irwanuddin menegaskan catatan historis ini menunjukkan Indonesia termasuk pelopor di bidang pemanfaatan tenaga atom. Ia menyampaikan rencana penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah dibahas sejak 1986.

Pengalaman berbagai negara, termasuk Rusia dan China, memperlihatkan manfaat teknologi nuklir dari sisi keekonomian bahan bakar hingga rendahnya tingkat polusi.

"Jadi hampir semua negara-negara besar mengambil inisiatif itu. Kenapa? Karena dari sisi masalah bahan bakar saja itu ekonomis. Kedua, dari sisi polusi sama sekali kecil dibandingkan dengan yang lain. Tapi bukan berarti kita meniadakan semua energi yang ada di Indonesia. Seluruh sumber daya bahan bakar kita itu harus kita optimalkan dan kita tidak boleh diatur oleh negara mana pun," ujarnya.

Irwanuddin menekankan pandangan negara besar terhadap nuklir yang cenderung progresif dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Ia juga menyinggung pentingnya tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya energi domestik, baik fosil maupun nonfosil, agar ketahanan energi tidak bergantung pada pihak luar. (wid,ist/dya)

USULAN KAPOLRI DITUNJUK PRESIDEN TANPA LEWAT DPR

Persatuan Purnawirawan Polri mengusulkan agar penunjukan Kapolri murni menjadi hak prerogatif presiden tanpa melalui proses di DPR. Diungkapkan kekhawatir, jika melalui dewan, Kapolri yang terpilih bakal memikul beban balas jasa. Diketahui selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui fit and proper test di DPR dulu. Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.

Mantan Kapolri Da'i Bachtiar mewakili Persatuan Purnawirawan Polri menyampaikan usulan itu usai audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/12/2025).

"Tadi disinggung adalah bahwa pemilihan Kapolri itu kan presiden toh, hak prerogatifnya presiden. Tetapi, presiden harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?" kata Da'i usai pertemuan.

Menurut Da'i, seharusnya presiden memilih calon Kapolri langsung karena itu merupakan kewenangan prerogatifnya. Ia menilai tidak perlu membawa kandidat Kapolri ke forum politik seperti DPR.

"Sebab apa? Ini dikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi oleh si Kapolri ini setelah milih karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu," katanya.

Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI.

Adapun dijelaskan melalui Pasal 11 ayat (2) usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.

Secara prosedur, respons atas usulan yang diajukan Presiden wajib diberikan dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3). "Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Jika DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan, calon yang diajukan oleh



presiden dianggap disetujui oleh DPR.

Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan

selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Untuk diketahui, negara juga mengatur batas masa jabatan anggota Polri berdasarkan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2).

Komisi III: Dimana Suara Rakyat?

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasir Djamil merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri agar penunjukan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden tanpa harus melibatkan DPR RI. Dia mempertanyakan, jika DPR tak dilibatkan maka tak ada suara rakyat. "Jika tidak mendapat persetujuan parlemen, di mana suara rakyat. Apalagi Polri itu untuk Masyarakat," ujar Nasir, Rabu (10/12/2025).

Nasir mengakui bahwa kedudukan dan tanggungjawab kepolisian langsung kepada Presiden. Namun, DPR RI juga memiliki kontrol sebagai check and balancing. Sehingga kata dia, peran DPR tak bisa dilepaskan dari pemilihan tersebut.

"Kepolisian itu kedudukannya dan tanggungjawabnya kepada Presiden. Karena itu kewenangannya sangat besar dan cakupannya sangat luas sehingga membutuhkan kontrol dari parlemen. Persetujuan dari DPR adalah bagian dari 'check and balancing', bukan ingin unjuk kekuasaan," jelasnya.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menjelaskan, dengan adanya DPR,

aspirasi masyarakat dapat tertampung terutama saat proses fit and proper test.

"Aspirasi orang per orang dan kelompok masyarakat tentang calon kapolri yang ideal dapat disampaikan ke parlemen sebagai bahan masukan dalam menguji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri," jelasnya.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menilai pemilihan kapolri tetap harus melewati uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR. "Apa sih tujuannya calon Kapolri itu di fit and proper test? Ya, tujuannya karena kita DPR itu adalah lembaga pengawasan, maka ya kita mengawasi sejak dari awal, termasuk calon Kapolrinya. Ya kan begitu," jelas Tandra saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Soedeson menilai ada aturan hukum yang mengatur bahwa proses pemilihan calon Kapolri harus lewat fit and proper test di DPR RI. "Ya, jadi semua usulan itu bagi kita sah-sah saja. Tapi kan kita ini harus lihat dasar hukumnya. Kan gitu kan," kata Tandra.

Menurutnya, DPR RI

"Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun." (wid,ist/dya)

Sejarah Pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

- **ERA ORDE LAMA DAN ORDE BARU**
Pada periode awal kemerdekaan hingga Orde Baru, proses pengangkatan Kapolri cenderung lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif, baik di bawah Presiden atau dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada saat itu. R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo adalah Kapolri pertamayang menjabat sejak 1945 hingga 1959. Selama era ABRI (sebelum Polri terpisah), Kapolri adalah bagian dari struktur militer dan pengangkatannya mengikuti mekanisme di dalam tubuh ABRI dan keputusan Panglima Tertinggi (Presiden).
- **ERA REFORMASI DAN PERUBAHAN MEKANISME**
Era Reformasi membawa perubahan besar dengan pemisahan Polri dari ABRI dan penempatannya di bawah Presiden secara langsung. Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), yang menetapkan mekanisme check and balances dalam pengangkatan Kapolri.
- **MEKANISME SAAT INI**
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Polri, proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri melibatkan langkah-langkah berikut:
 - **Hak Prerogatif Presiden:** Presiden memiliki hak untuk mengusulkan dan memberhentikan Kapolri.
 - **Persetujuan DPR:** Usulan Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Proses ini biasanya melibatkan:
 - a. Presiden mengajukan calon (biasanya lebih dari satu, atau satu nama tunggal yang disetujui Kompolnas) kepada DPR. Komisi III DPR (bidang hukum, HAM, dan keamanan) melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon yang diajukan.
 - b. DPR memberikan persetujuan atau penolakan dalam sidang paripurna. Pelantikan: Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden melantik Kapolri secara resmi.
 - c. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan politik terhadap institusi kepolisian, meskipun status hak prerogatif Presiden tetap dipertahankan.
- **USULAN TERBARU**
Wacana mengenai perubahan mekanisme (misalnya, usulan agar Presiden dapat menunjuk langsung tanpa persetujuan DPR untuk menjaga independensi) masih menjadi bahan diskusi hingga saat ini.

menjalankan aturan yang berlaku sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawas. "Kita ikut aturannya, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR," ucap dia. (ist,kum/dya)

MINTA PROYEK, WAKIL WALI KOTA BANDUNG JADI TERSANGKA KORUPSI

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Keduanya adalah Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota aktif DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA). Keduanya telah terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta paket pekerjaan kepada pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.

Kejaksa Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025. Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka. "Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung. Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pihak yang terafiliasi dengan para tersangka.

"Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan



menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

Meski telah ditetapkan tersangka, Kejari Bandung belum menahan para tersangka. "Terkait dengan penahanan atau tidak. Sampai dengan saat ini Kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan," kata Kasi Pidsus Ridha Nurul Ihsan.

Menurutnya, penahanan tak

dilakukan karena pihaknya harus meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri. "Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri," beber dia.

Kedua tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan OPD Kota Bandung. Namun

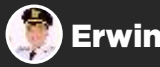
pihaknya belum dapat menyebutkan secara detail paket pekerjaan tersebut lantaran masuk dalam materi penyidikan. "Yang bisa kami sampaikan adalah beberapa proyek di beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bandung saja," ucapnya.

Saat ini sudah ada sekitar 75 saksi yang telah dimintai keterangan dalam dugaan kasus tersebut, sejumlah barang bukti berupa berkas dokumen, elektronik, dan lainnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Erwin adalah politikus dari PKB. Sementara Rendiana merupakan Ketua Fraksi NasDem di DPRD Kota Bandung. Berdasarkan situs LHKPN KPK, Erwin terakhir menyampaikan laporan kekayaannya pada 10 Maret 2025. Dalam laporan itu, Erwin punya harta Rp 25,4 miliar. (gus,rks,tmo/dya)

INTIP KEKAYAAN ERWIN DAN RENDIANA



TOTAL KEKAYAAN
Rp 25.4 miliar
LHKPN KPK, pada 10 Maret 2025

Tanah & bangunan
Rp 23.04 miliar

Kendaraan senilai
Rp 1.63 miliar

Harta bergerak lainnya
Rp 260 Juta

Kas dan setara kas senilai
Rp 3.15 miliar

HUTANG
Rp 2.6 miliar



TOTAL KEKAYAAN
Rp -1.17 miliar
LHKPN KPK, pada 18 Maret 2025

Kendaraan senilai
Rp 945 juta

Kas dan setara kas senilai
Rp 131 juta

HUTANG
Rp 2.25 miliar

Guru Besar UGM Sebut Dampak dari Mahalnya Biaya Politik

SELAMA rentang bulan Agustus hingga November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya sudah menangkap tiga kepala daerah yang terdiri para Gubernur dan Bupati. Padahal para kepala daerah ini belum setahun menjabat karena baru saja dilantik pada Februari silam. Berdasarkan catatan KPK, sebanyak 51 persen dari kasus korupsi yang mereka ditangani berasal dari pejabat daerah. Sepanjang 2004-2024 ada sebanyak 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Guru Besar UGM Bidang Tata Kelola Kebijakan Publik Prof. Gabriel Lele, mengatakan motif utama yang memungkinkan para pejabat melakukan tindak pidana korupsi mahal biaya politik ketika pencalonan dan kurangnya tindak adil negara dalam memperlakukan 'kesejahteraan' kepala daerah untuk mengembalikan dana yang telah

mereka gunakan dalam pencalonan. "Sebagian kepala daerah pembiayaannya bukan ditanggung partai tetapi mayoritas harus mencari sendiri," ucapnya, dikutip Rabi (10/12/2025).

Menurut Gabriel, pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan tindak korupsi. Pertama dengan mengubah sistem kepartaian dari partai massa menuju ke partai kader. Partai kader umumnya memiliki ideologi yang jelas serta anggota yang tetap. Kedua, pembiayaan politik untuk persiapan kampanye ditanggung oleh negara dengan risiko yang besar bahwa dana tersebut akan digunakan sebaik-baiknya.

Selain dari pemerintah, bagi Gabriel menekankan bahwa idealnya masyarakat yang memutuskan memilih seseorang atau sebuah partai karena

pertimbangan programatik calon pemimpin bukan karena hal lain karena politik uang. "Kalau publiknya mau berani menolak serangan fajar misalnya, bantuan-bantuan tidak jelas dengan motif politik, saya kira partai politik juga akan memikirkan kembali hal tersebut," katanya.

Bagi Gabriel, untuk menekan korupsi para kepala daerah ini kuncinya pada kesadaran politik atau pendidikan politik masyarakat. Selama mayoritas masyarakat masih terhimpit dengan kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tidak akan ada perubahan. Dengan meningkatkan kesadaran politik maka masyarakat semakin sadar bahwa suara mereka itu penting dan tidak bisa diperjual belikan. "Yang berhak mendapatkan suara mereka adalah calon pemimpin yang memiliki program yang jelas," ujarnya. (ugm,gus,rls/dya)

NAIK KE PENYEDIKAN, AROMA PIDANA KAYU GELONDONGAN BANJIR SUMUT MENGUAT

Bareskrim Polri menaikkan penanganan kasus dugaan pembalakan liar di Sumatera Utara dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya ada dugaan pidana dalam kasus itu. Kasus ini terkait dengan bencana banjir yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Tapsel; dan Anggoli, Tapteng.

Saat banjir terjadi banyak gelondongan kayu yang hanyut. Kayu-kayu besar itu juga menghambat aliran sungai sehingga membuat luapan air membesar ke pemukiman warga.

"Dasarnya adalah tentunya ditemukan dua alat bukti, adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir," kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, dalam keterangannya pada Rabu (10/12/2025).

Sementara itu, Kassubag Ops Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Fredya Trihararbakti, mengatakan pihaknya menemukan adanya perubahan yang signifikan jika membandingkan antara kondisi alam sebelum dan setelah banjir menerjang. Selain itu, polisi menemukan adanya bulldoser dan ekskavator yang terparkir.

"Itu ditemukan alat berat satu bulldoser dan dua ekskavator. Sekarang penyidik sedang mendalami operatornya yang kebetulan saat ditemukan alat tersebut, operatornya tidak ada," ucap dia.

Kemudian, sambung Fredya, polisi juga mendapati adanya indikasi perluasan lahan. Hal itu ditandai dari bekas longsor yang dinilai tak alami atau diduga ada campur tangan manusia.

"Nah, ini di KM 6 ini di sini terlihat ada bukaan lahan dan ada longsor akibat bukaan lahan dan aliran sungai bentukan. Karena adanya arus sungai yang deras menuju sungai Garoga," kata dia.

Dalam kasus itu, polisi menelusuri dugaan pelanggaran Pasal 109 Juncto Pasal 98 juncto Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, mengatakan jumlah korban tewas hingga Rabu (10/12/2025) mencapai 969 jiwa.

"Bertambah 5 jasad. Pada hari ini



menjadi 969 jiwa dengan ditemukannya tambahan korban di Langkat, Sumatera Utara, dan 3 korban di Padang Pariaman, Sumatera Barat," kata Abdul saat jumpa pers di Aceh.

Sementara jumlah korban yang masih hilang tercatat sebanyak 252 jiwa. "Untuk korban hilang pada hari ini berkurang 12 orang. Data yang kemudian direkapitulasi dan

dimutakhirkan oleh Posko 2 provinsi kemarin terdata 264 jiwa daftar pencarian orang, saat ini berjumlah 252 jiwa," katanya. Di sisi lain, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 894.501 orang.

Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kementerian Kehutanan Tapanuli Selatan telah mengidentifikasi jenis-jenis kayu

gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan. Beberapa jenis kayu itu berupa kayu pohon karet, meranti, ketapang durian, hingga bayur.

Hasil penyelidikan sementara, dua jenis kayu yang ditemukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga itu identik dengan vegetasi dan kayu di lahan bukaan PT TBS. Perusahaan ini membuka lahan di perbukitan wilayah DAS Saroga.

"Ada dua yang identik, kayu karet dan bayur," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni di Tapanuli Selatan.

Pihak PT TBS telah dimintai keterangan oleh penyidik. Bareskrim kini telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan setelah dianggap memiliki alat bukti yang cukup.

Kayu-kayu itu sempat menyumbat aliran dua jembatan di aliran Sungai Garoga, perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Air pun meluap dan mengalir deras menyapu permukiman warga.

Kedua jembatan itu pun ambruk. Ada 115 rumah warga di sekitar jembatan yang hanyut dan 51 mengalami rusak berat. (wid,tmo,rls/dya)

Gaduh soal Donasi, Mensos: Silakan, Tidak Perlu Izin



Ferry Irwandi menyapa korban banjir Sumatera. (Instagram @irwandiferry)

SUASANA duka menyelimuti halaman area depan gedung Disaster Victim Identification (DVI) RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa (9/12/2025) malam.

Di antara kerumunan keluarga yang mencari kabar, Prasetyo berdiri dengan tatapan nanar. Ia adalah sepupu dari Novia—perempuan berusia 25 tahun yang menjadi salah satu korban kebakaran di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat.

dari suaminya korban. Kalau suaminya dapat kabar dari mana saya enggak tahu," jelasnya.

Kini, Prasetyo tengah mendampingi suami dan mertua Novia di RS Polri. Kehilangan Novia menyisakan pilu mendalam bagi keluarga. Pasalnya, Novia yang tengah hamil tua itu menanti kelahiran anak pertamanya pada Januari mendatang.

"Udah tua, ya [usia

Dengan suara lirih, Prasetyo menceritakan kabar duka diterimanya lewat telepon dari pihak keluarga yang memuatnya terhenyak. Saat itu, Prasetyo tengah berada dalam perjalanan.

"Tadi itu lagi di jalan, kayaknya jam habis asar, ya. Jam 3-an lah," ujar dia kepada wartawan.

"Ditelepon mertua, ditelepon dapat kabar

kandungannya]. Kemungkinan Januari itu udah mau, udah HPL-nya, ya," ucap Prasetyo.

Meski tengah hamil besar, Novia ternyata masih bekerja seperti biasa di Terra Drone. Prasetyo menyebut, sepupunya itu terjebak di lantai 5 gedung saat kebakaran terjadi.

Novia sempat berupaya turun ke bawah untuk menyelamatkan diri. Namun, ia kembali ke lantai 5 lantaran asap yang makin pekat.

"Di lantai 5, mau turun ke lantai 1 karena api sudah berasap, balik lagi ke lantai 5 dan terjebak di situ," tutur Prasetyo.

"Dari kondisinya, sih, alhamdulillah aman, ya, maksudnya masih utuh. Mungkin [kehabisan] oksigen," imbuhnya.

Di tengah kebingungan dan kesedihan itu, keluarga masih menunggu proses identifikasi di Instalasi Forensik RS Polri sebelum membawa Novia untuk dimakamkan di Lampung, kampung halamannya. (wid,ist,kum/dya)

Pembangunan Pasar Blimbing Menggantungkan DPRD Kota Malang Sarankan Perjanjian Kerja Sama Ulang



Kondisi Pasar Blimbing, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Nasib pembangunan Pasar Blimbing hingga kini masih menggantung. DPRD Kota Malang menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ulang dengan pihak ketiga.

Langkah tersebut dinilai penting

untuk memberikan kepastian hukum atas kelanjutan proyek pasar ini.

"PKS ulang, lah ya, atau adendum. Karena memang posisinya saat ini harus menerapkan win-win solution. Karena kalau kita lihat, yang jadi k o r b a n sesungguhnya kan juga pedagang pasar Blimbing itu sendiri," ujar anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Indra Permana, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, jika tidak ada pembaruan

kerja sama, proses penyelesaian justru akan semakin bertele-tele. Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menegaskan Pemkot Malang harus segera menentukan langkah penyelesaian terbaik.

"Intinya dari rekomendasi BPK, Pemkot Malang harus segera

mencari solusi yang terbaik. Salah satunya dengan PKS ulang," tegasnya.

Ditegaskannya, akar persoalan Pasar Blimbing adalah hubungan Pemkot Malang dengan pengembang. Selama masalah tersebut belum tuntas, maka pembangunan pasar tidak akan menemukan titik terang. "Ini masalahnya Pemkot dengan pihak ketiga. Kalau itu tuntas, insyaallah tuntas," tambah Indra.

Komisi B DPRD Kota Malang juga terus memberikan tekanan agar persoalan ini segera diselesaikan. Menurut Indra, upaya penyelesaian telah beberapa kali dilakukan Pemkot Malang, namun hasil akhirnya masih harus ditunggu.

"Kami menekankan, ayo segera dituntaskan permasalahan di Pasar Blimbing ini. Tetapi untuk teknisnya nanti menunggu teman-teman di Pemkot," katanya.

Ketika disinggung soal opsi memutus Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT KIS, Indra tidak menampik bahwa hal tersebut sebenarnya memungkinkan dilakukan. Namun, ia mengingatkan,

keputusan itu memiliki konsekuensi hukum yang berat bagi Pemkot Malang.

"Konsekuensi hukumnya berat. Makanya kalau untuk teknisnya seperti apa, kami juga sedang menunggu," jelasnya.

Indra berharap, seluruh proses penyelesaian dapat mencapai titik final pada tahun 2026 mendatang sehingga pedagang dan masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian. "Harapan kami, tahun depan sudah clear. Sudah ada kejelasan untuk nasib Pasar Blimbing," katanya.

Untuk saat ini, menurutnya, penggunaan APBD untuk memperbaiki Pasar Blimbing hanya memungkinkan untuk perbaikan kecil. Sedangkan perbaikan total atau revitalisasi, APBD tidak dapat digunakan karena menyangkut status legalitas kerja sama yang masih menggantung dengan pihak ketiga, yakni PT KIS.

"Yang sifatnya kecil, Diskopindag masih bisa meng-handle. Kalau perbaikan besar, total, tidak bisa dengan APBD. Karena itu harus jelas dulu posisi kerja samanya dengan PT KIS," jelasnya. (Santi/Dya)

DPRD Kabupaten Malang Menyoal Belum Terbitnya Perbup Disabilitas, Ada Apa?

MALANG- Belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang menuai sorotan dari DPRD setempat. Dewan menilai ini membuat berbagai program layanan, termasuk pembangunan shelter khusus bagi penyandang disabilitas, belum bisa berjalan optimal.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan daerah (Perda) Disabilitas DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko, mengatakan Kabupaten Malang sebenarnya telah memiliki Perda Disabilitas Nomor 2 Tahun 2025. Namun tanpa Perbup sebagai aturan turunan, implementasi kebijakan menjadi terhambat.

"Hari ini kita sudah punya Perda Disabilitas. Tinggal kita minta Pak Bupati agar semakin menguatkan dengan mengeluarkan Perbup. Kita berikan anggaran untuk membangun shelter melalui dinas sosial," ujar Feri, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Dijelaskannya, Perda yang disahkan pada Juli 2025 tersebut mengatur penghormatan, perlindungan, hingga pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun

berbagai program yang diamanatkan dalam Perda tersebut, seperti layanan perlindungan dan penanganan disabilitas, belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Menurutnya, Perbup menjadi dasar hukum penting untuk penyusunan anggaran, pembagian kewenangan antar dinas, serta pengembangan fasilitas pelayanan sosial yang ramah disabilitas.

"Kita butuh payung hukum supaya Pemkab bisa menganggarkan secara tepat dan menjalankan program sesuai Perda. Tanpa Perbup, semuanya tidak bisa bergerak maksimal," terangnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi adalah pembangunan shelter khusus bagi penyandang disabilitas maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kabupaten Malang yang merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Timur dan dihuni hampir tiga juta jiwa, hingga kini belum memiliki shelter yang memadai.

"Kabupaten Malang ini wilayahnya luas, penduduknya banyak. Tapi kita

belum punya shelter yang memadai bagi penyandang disabilitas atau PPKS," ungkap Feri.

Shelter tersebut, kata dia, diperlukan untuk memberikan penanganan sementara, rehabilitasi, hingga layanan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan tempat perlindungan.

Feri menegaskan, penerbitan Perbup Disabilitas merupakan langkah awal sebelum pemerintah dapat menyiapkan anggaran pembangunan shelter dan menetapkan lokasi yang tepat.

"Insyaallah harapannya di 2026 pelaksanaannya. Perda sudah ada, tinggal Perbup saja itu. Mereka ini kan juga makhluk hidup, jadi harus dirawat dan dilindungi," katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, hadirnya shelter merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab



Ilustrasi: Penyandang disabilitas di Kabupaten Malang menerima bantuan kaki palsu. (dok. Ist)

Malang dalam menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas.

"Lokasinya pasti ada nanti. Perda ada, dikuatkan dengan Perbup, maka kita bisa anggarkan. Nanti kalau sudah begitu kita cari aset kita yang kosong, kita buat shelter kan bisa," imbuhnya. (Santi/Dya)

MENCEKAM! PERANG THAILAND-KAMBOJA MELUAS KE 5 PROVINSI

Phnom Penh Resmi Mundur dari SEA Games 2025

Perang Thailand-Kamboja meluas ke lima provinsi di wilayah perbatasan kedua negara bertetangga itu. Ratusan ribu orang mengungsi, korban tewas mencapai 13 orang. Sekitar 400.000 pengungsi berada di Thailand, sementara 100.000 lainnya mengungsi di Kamboja, dilansir dari CNA, Rabu (10/12/2025). Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2025 di Thailand pun diguncang kabar mengejutkan. Hanya berselang satu hari setelah upacara pembukaan yang meriah, Kontingen Kamboja memutuskan untuk mengundurkan diri secara total dari ajang multievent tersebut.

Kamboja resmi mengundurkan diri total dari kompetisi SEA Games 2025, hanya sehari setelah pembukaan akibat konflik perbatasan berdarah dengan tuan rumah Thailand.

Langkah drastis ini diambil menyusul eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di perbatasan antara Kamboja dan tuan rumah Thailand.

Kepastian mundurnya Kamboja dikonfirmasi langsung oleh pejabat senior SEA Games, Akarin Hiranprueck. Kepada kantor berita AFP, Akarin menegaskan bahwa negara tetangga Thailand tersebut tidak akan melanjutkan partisipasinya.

"Telah dikonfirmasi bahwa Kamboja telah mengundurkan diri," tegas Akarin.



Ribuan orang terpaksa mengungsi akibat pertempuran baru di perbatasan Thailand-Kamboja (ist.Raywatta chitthipaisan)

Pemicu utama keputusan ini adalah pecahnya kembali perang di wilayah perbatasan yang disengketakan kedua negara.

Gencatan senjata yang sebelumnya sempat dimediasi oleh Amerika

Serikat (AS) gagal meredam ketegangan.

Kondisi di lapangan kian tak terkendali, memaksa terjadinya eksodus massal. Lebih dari 500.000 warga dari kedua sisi perbatasan

Wilayah utama yang terdampak meliputi:

Di Kamboja

- **Preah Vihear:** Lokasi Candi Preah Vihear, sering terjadi pertempuran dan pengungsian massal.
- **Oddar Meanchey:** Berbatasan Thailand, terdampak pertempuran dan evakuasi warga.
- **Banteay Meanchey:** Perbatasan, terkena serangan artileri dan evakuasi penduduk.
- **Pursat & Battambang:** Distrik-distrik terdampak bentrokan terbaru.

Di Thailand

- **Provinsi Surin:** Di sisi Thailand, wilayah dekat Candi Ta Muen Thom menjadi titik ketegangan dan pertempuran.
- **Provinsi Sisaket:** Berbatasan langsung dengan Provinsi Preah Vihear di Kamboja dan sering menjadi lokasi evakuasi warga Thailand.
- **Provinsi Buriram:** Ribuan warga dievakuasi ke tempat penampungan sementara di provinsi ini selama pertempuran berlangsung.



dilaporkan telah mengungsi demi mencari tempat aman.

Sebelum memutuskan mundur total, Ketua Komite Olimpiade Nasional Kamboja, Vath Chamroeun, sempat menyatakan menarik diri dari delapan cabang olahraga dengan alasan "keamanan". Namun, seiring meluasnya bentrokan hingga ke lima provinsi pada Selasa lalu, Kamboja akhirnya menarik seluruh kontingennya.

Mundurnya Kamboja menjadi ironi besar di tengah semangat sportivitas SEA Games 2025 yang memperebutkan 574 medali emas.

Pasalnya, pada upacara pembukaan (opening ceremony) yang digelar di Stadion Nasional Rajamangala, Selasa (9/12/2025) kemarin, atlet Kamboja masih terlihat mengikuti parade defile di hadapan keluarga kerajaan Thailand dengan pengamanan super ketat.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan sengketa lama yang berakar dari ketidaksepakatan peta wilayah warisan kolonial Prancis, termasuk klaim atas sejumlah kuil kuno di perbatasan. Perselisihan yang telah berlangsung lebih dari satu abad ini kini kembali menutupi sorotan prestasi olahraga di Asia Tenggara.

Menurut laporan kantor berita AFP, militer Thailand melepaskan tembakan ke arah Provinsi Banteay Meanchey pada Selasa dini hari. Dua warga sipil yang sedang melintas di Jalan Nasional 54 tewas setelah terkena tembakan. (wid,ist,tmo/dya)

Trump Klaim akan Menghentikan Perang

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia berencana untuk "menelepon" pada hari Rabu (10/12/2025) mengenai bentrokan yang kembali terjadi antara Thailand dan Kamboja.

Dalam pidato kampanye kepada para pendukungnya di negara bagian Pennsylvania, AS timur laut, pada hari Selasa (9/12/2025) waktu setempat, Trump menyebutkan berbagai konflik yang telah ia tangani secara diplomatik. Dia melanjutkan dengan mengatakan: "Dan saya benci mengatakan ini, salah satunya adalah Kamboja-Thailand, yang dimulai hari ini."

"Besok, saya harus menelepon, dan saya pikir mereka akan mengerti," imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/12/2025).

"Siapa lagi yang bisa mengatakan, 'Saya akan menelepon dan menghentikan perang antara dua negara yang sangat kuat'" cetus pemimpin AS tersebut.

Trump ikut menandatangani gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand pada bulan Oktober lalu selama kunjungannya ke Asia.

Dilansir BBC, Rabu (10/12/2025), perselisihan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Itu bermula ketika batas-batas kedua negara ditetapkan setelah pendudukan Prancis atas Kamboja.

Permusuhan meningkat pada tahun 2008, ketika Kamboja berupaya mendaftarkan kuil abad ke-11 yang terletak di area yang disengketakan, sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Langkah tersebut disambut dengan protes keras dari Thailand. Selama bertahun-tahun, bentrokan sporadis telah terjadi, mengakibatkan tewasnya tentara dan warga sipil dari kedua belah pihak.

Bentrokan antara Thailand dan Kamboja makin memanas. KBRI Phnom Penh mengimbau WNI yang berada di Poipet untuk berpindah ke

daerah yang lebih aman.

Imbauan itu disampaikan melalui Instagram KBRI Phnom Penh. Meski bukan termasuk wilayah konflik, antisipasi perlu dilakukan untuk mengantisipasi bentrok meluas ke daerah tersebut.

"Memperhatikan perkembangan situasi keamanan di perbatasan Thailand-Kamboja, otoritas setempat di Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey menyampaikan bahwa Poipet bukan termasuk wilayah konflik," tulis Instagram KBRI Phnom Penh seperti dilihat Rabu (10/12/2025).

"Namun demikian, menimbang saat ini konflik belum mereda dan terdapat potensi meluas, maka disarankan bagi WNI di Poipet untuk sementara waktu pindah ke daerah yang lebih aman," lanjutnya.

Para WNI juga diminta untuk mematuhi arahan dari otoritas setempat. WNI diarahkan untuk lapor diri pada portal peduli WNI. (afo,gus,rls/dya)

VIRAL DI MEDSOS: BENARKAH BETIS 'JANTUNG KEDUA' MANUSIA?

Bayangkan rutinitas sehari-hari, duduk berjam-jam di depan laptop, meeting tanpa henti, atau berdiri lama saat di kereta. Setelah pulang, kaki terasa berat, pegal, bahkan bengkak. Banyak orang mengira ini masalah biasa, padahal kondisi tersebut erat kaitannya dengan otot betis yang sering disebut sebagai 'jantung kedua.' Kenapa disebut begitu?

Sebuah unggahan yang membahas soal 'jantung kedua' di betis viral di media sosial Instagram. Pemilik akun @doktervito yang mengunggah konten tersebut menjelaskan keberadaan 'jantung kedua' ini masih banyak belum diketahui orang.

Pemilik akun tersebut, dr Vito A Damay, SpJP, menjelaskan darah yang ada di kaki lebih sulit untuk kembali ke jantung akibat adanya gravitasi. Otot betis di sini bertugas membantu memompa balik darah ke jantung, agar proses sirkulasi berjalan lancar.

"Banyak orang nggak tahu kita punya jantung kedua. Jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dari kaki itu naik ke jantung itu susah, karena ada gravitasi. Jadi kita punya jantung kedua itu di betis. Nah, betis itu harus dilatih. Jalan kaki dan jalan cepat itu cara melatihnya," kata dr Vito dikutip dalam unggahannya. dr Vito menjelaskan otot betis dijuluki 'jantung kedua' karena

funksinya membantu mendorong darah dari pembuluh darah kaki ke arah jantung. Otot betis yang terlibat adalah gastrocnemius dan soleus, keduanya mengapit pembuluh darah vena dalam.

Ketika seseorang berjalan, berdiri, atau mengangkat tumit, otot ini berkontraksi dan menekan vena. Akhirnya darah yang ada terdorong naik ke atas.

"Di vena terdapat katup satu arah yang membuat darah tidak jatuh kembali ke bawah. Proses 'pompa mekanis' ini membuat aliran balik vena ke jantung," jelas dr Vito.

dr Vito menambahkan sistem 'jantung kedua' ini hanya bekerja ketika seseorang berjalan, berdiri, atau ada kontraksi otot aktif. Pada saat istirahat atau berbaring, otot betis tidak bekerja aktif.

Tanpa ada aktivitas otot betis, adanya efek gravitasi membuat pompa darah ke jantung menjadi lebih susah.

"Saat terlalu lama duduk atau berdiri diam, pompa ini (betis) tidak aktif, sehingga darah berkumpul di kaki membuat tekanan darah vena khaki meningkat," ungkap dr Vito menambahkan apa yang pada sistem 'jantung kedua' saat terlalu lama berdiri atau duduk.

Dampak Kurang Bergerak

Bekerja 8-9 jam yang mayoritas dilakukan dengan duduk di depan layar membuat banyak pekerja kantoran berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, salah satunya sitting disease yang merujuk pada sekelompok 34 kondisi kesehatan kronis.

Dampak ini biasanya muncul akibat minimnya aktivitas fisik dan kebiasaan duduk terlalu lama tanpa jeda. Kebiasaan tersebut ternyata dapat memberikan efek serius pada kesehatan jantung.

Menurut Dr. dr. Antonia Anna Lukito, SpJP(K), FIHA, seorang spesialis jantung dan pembuluh darah, "Penyakit jantung di usia muda ternyata karena kelamaan duduk.

Sekarang screen time-nya banyak, jarang beranjak dari



tempat duduknya. Untuk anak muda, perhatikan sitting disease," jelas dr. Antonia seperti dikutip dari laman health.detik.com.

Pernyataan ini menegaskan bahwa gaya hidup modern yang serba digital membuat risiko penyakit kardiovaskular meningkat lebih cepat dari yang disadari. Namun, berdiri terlalu lama pun bukan solusi ideal.

Tren standing desk yang sempat populer beberapa tahun terakhir justru dapat meningkatkan risiko varises dan pembekuan darah, terutama jika dilakukan tanpa disertai gerakan.

Seperti disampaikan Dr. Sharonne Hayes, ahli jantung dari Mayo Clinic, "Berdiri lama dalam beberapa hal bisa lebih buruk dibanding duduk lama untuk kesehatan pembuluh darah."

Artinya, tubuh tetap membutuhkan sirkulasi yang aktif agar aliran darah bekerja optimal.

Jadi, kuncinya bukan sekadar memilih duduk atau berdiri, melainkan menjaga tubuh tetap aktif bergerak sekecil apa pun gerakannya untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan masalah pembuluh darah. (wid/ist/dtc/dya)

Latihan Sederhana Otot Betis

Jalan Kaki:

30 menit setiap hari sangat efektif untuk mengaktifkan otot betis.

Jinjit (Calf Raises):

Lakukan gerakan naik-turun menggunakan ujung kaki, bisa sambil berdiri antre atau menunggu. Lakukan perlahan, fokus pada kontraksi otot.

Naik-Turun Tangga:

Pilih tangga daripada lift jika memungkinkan untuk melatih otot betis secara alami.

Wall Sit:

Duduk bersandar di dinding (punggung rata) selama 2-3 menit, lakukan 3-4 kali seminggu untuk membantu menurunkan tekanan darah.

Istirahatkan Kaki:

Berbaring dan angkat kaki lebih tinggi dari bantal selama 15-30 menit untuk mengurangi bengkak.



PANEN AIR ATMOSFER PAKAI GELOMBANG ULTRASONIK, HANYA BUTUH HITUNGAN MENIT

Para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Amerika berhasil mengembangkan teknologi baru yang mampu mengambil air langsung dari udara. Kemudian mengubahnya menjadi air minum hanya dalam beberapa menit. Kekeringan pun bakal memiliki solusi cepat.



bekerja dengan cara menarik uap dari udara dan mengembunkannya menjadi air cair. Proses ini melibatkan pendinginan udara lembap atau penggunaan sorben (material seperti spons) untuk menyerap uap air, yang kemudian dilepaskan dan dikondensasikan menjadi tetesan air.

Perangkat AWH biasanya mengandalkan sinar matahari untuk menguapkan air dari sorben. Hal itu memakan waktu yang cukup lama, mulai dari beberapa jam bahkan sampai berhari-hari.

Tentunya hal ini menjadi tantangan karena membatasi kegunaannya di lingkungan kering dan kekurangan sumber daya, termasuk wilayah yang tidak memiliki air asin untuk didesalinasi.

Sekarang, perangkat baru yang dikembangkan MIT menggunakan gelombang ultrasonik untuk melepaskan kelembapan dari sorben.

Setelahnya, kelembapan yang terlepas kemudian dialirkan melalui nozel kecil di dasar perangkat, tempat kelembapan tersebut dapat dikumpulkan dan digunakan.

Disadur dari Livescience.com, para peneliti berpendapat bahwa prototipe ultrasonik mereka 45 kali lebih efisien dalam mengekstraksi air yang tertangkap dibandingkan penguapan biasa. Mereka merinci temuan

tersebut dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 18 November di jurnal Nature Communications.

"Orang-orang telah mencari cara untuk memanen air dari atmosfer, yang bisa menjadi sumber air sangat besar, terutama untuk wilayah gurun dan tempat-tempat yang bahkan tidak memiliki air asin untuk didesalinasi," ujar Svetlana Boriskina, rekan penulis sekaligus ilmuwan peneliti utama di MIT.

Teknologi baru ini mengandalkan ultrasound gelombang suara berfrekuensi tinggi di atas 20 kilohertz, yang tidak dapat didengar manusia untuk memutus ikatan lemah antara molekul air dan permukaan bahan penyerap. Inti perangkatnya adalah cincin keramik pipih yang bergetar ketika diberi tegangan.

Getaran ultrasonik ini bekerja secara presisi, seperti mengguncang butiran air halus hingga lepas dari permukaan bahan penyerap. "Rasanya seperti air menari mengikuti ombak," ujar Ikra Iftekhar Shuvo, penulis utama dan mahasiswa pascasarjana MIT.

Molekul-molekul air yang terlepas kemudian berubah menjadi tetesan yang bisa dikumpulkan. Dalam pengujiannya, sampel sorben seukuran koin 25 sen ditempatkan dalam ruang kelembapan hingga jenuh.

Setelah itu dipasangkan pada aktuator ultrasonik, dan hanya dalam beberapa menit sampel tersebut benar-benar kering proses yang biasanya memakan waktu berjam-jam. Walau efisien, perangkat ultrasonik ini tetap

membutuhkan sumber energi, berbeda dengan sistem AWH tradisional yang hanya mengandalkan sinar matahari. (liv,tin/dya)

FAKTA TENTANG AIR DI ATMOSFER

Bentuknya beragam:

Ada sebagai uap air (gas), tetesan air cair (awan, hujan), dan kristal es (awan tinggi, salju).

Selalu ada:

Bahkan udara yang terlihat jernih pun mengandung uap air yang sangat kecil.

Proses utama:

Terbentuk dari penguapan (evaporasi) dari badan air dan transpirasi dari tumbuhan, yang naik ke atmosfer dan membentuk awan (kondensasi).

Peran penting:

Menyediakan air tawar melalui presipitasi (hujan). Mengatur suhu bumi dengan melepaskan energi panas saat kondensasi.

Dipengaruhi kondisi:

Suhu, angin, kelembapan relatif, topografi, dan ketinggian memengaruhi jumlah air di atmosfer.

Lokasi konsentrasi:

Lautan tropis dan daerah lembap memiliki uap air paling banyak.

Masalah Polusi:

Air hujan bisa mengandung mikroplastik, terutama di kota besar, akibat pencemaran plastik dari daratan.

Terancam oleh Perubahan Iklim:

Pemanasan global dapat meningkatkan penguapan air ke atmosfer, tetapi juga meningkatkan risiko kekeringan dan ketidakseimbangan siklus air

Peneliti MIT berhasil mengembangkan perangkat baru yang dibutuhkan untuk memanen air dari atmosfer lebih cepat, dari hitungan hari kini menjadi menit. Para peneliti MIT telah mengembangkan perangkat yang dapat mengumpulkan kelembapan dari udara dan memodifikasinya menjadi air minum. Tentunya para peneliti berharap agar teknologi ini menjadi angin segar untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat yang sumber airnya langka. Pada awalnya, Sistem Pemanenan Air Atmosfer (AWH)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Normcore, Gaya 'Boring Fashion' Masa Depan Mode Berkelanjutan

Gaya normcore yaitu tampilan sederhana, polos, dan terkesan biasa alias 'boring fashion' mendominasi lini masa media sosial sepanjang 2025. Hal ini bak menjadi titik balik masyarakat yang mulai lelah dengan mikrotren dan siklus mode cepat. Estetika minimalis ini justru menjadi pilihan baru yang dianggap lebih relevan dan berkelanjutan.

Di tengah derasnyanya arus tren mode yang silih berganti, muncul satu gaya yang justru menolak untuk mengikuti arus: normalhardcore atau normcore.

Gaya berbusana ini memuliakan kesederhanaan kaus polos, rok polos, jins, sneakers berwarna netral, suatu simbol keaslian diri.

Bagi banyak perempuan, normcore bukan sekadar pilihan busana, melainkan bentuk pernyataan bahwa kenyamanan dan kepercayaan diri tak mesti selalu tampil mencolok.

Di balik tampilannya yang "biasa", ada keberanian untuk tidak larut dalam tekanan untuk terlihat sempurna, melainkan jujur terhadap diri sendiri. Normcore juga menjadi cerminan

cara berpikir baru tentang mode dan konsumsi.

Perempuan yang mengadopsi gaya ini acap kali memilih berbelanja dengan lebih cerdas. Mereka membeli lebih sedikit, tetapi dengan kualitas yang tahan lama.

Kesederhanaan yang ditawarkan normcore bisa jadi sejalan dengan prinsip sustainability: setiap potongan pakaian dipilih karena fungsinya, alih-alih mengikuti tren sesaat.

Dalam konteks ini, gaya berpadu dengan kesadaran, sebuah bentuk perlawanan halus terhadap budaya cepat konsumsi dan fesyen instan.

Lebih dari sekadar estetika, normcore adalah filosofi hidup, dengan menampilkan perempuan yang mau menerima diri apa adanya, menghargai keseharian, dan menolak hiruk-pikuk ekspektasi sosial tentang "tampilan ideal".

Pada kehidupan perempuan modern, gaya ini menghadirkan kebebasan untuk menjadi versi paling autentik dari diri mereka tanpa harus kehilangan rasa anggun atau kuat.

Normcore bukan tentang berusaha tampak berbeda, melainkan tentang merasa cukup, nyaman, dan percaya diri dalam kesederhanaan yang justru paling memikat.

Dikutip dari laman Masari Shop, normcore merupakan reaksi terhadap dunia fesyen yang mungkin selama ini dianggap terlalu fokus mencari keunikan dan kebaruan.

Gaya ini mengutamakan kesederhanaan dan fungsionalitas busana yang nyaman, tidak mencoba terlihat lebih berkelas atau sok penting, serta tidak perlu mengikuti tren musiman yang cepat berganti. Dengan tampil "apa adanya", para penggemar gaya ini justru menegaskan individualitas yang tak bergantung pada merek atau label desainer.

Normcore menantang norma mode konvensional dengan merengkuh hal-hal yang dianggap lumrah atau "biasa", seperti kaus polos, celana jins, dan sepatu kets, yang ternyata bisa tampil begitu elegan dalam kesederhanaannya. Di dunia yang serba cepat, normcore mengajarkan kita satu hal bahwa menjadi diri sendiri, dengan cara paling sederhana sekalipun, bisa jadi adalah bentuk kebebasan yang paling menawan.

Berawal dari Sarkasme

Dikutip EBSCO, istilah normcore pertama kali mencuat dari sebuah agensi peramal tren mode asal New York bernama K-Hole. Agensi yang dikenal karena pendekatannya yang nyeleneh, menggunakan sarkasme dan parodi untuk membaca perilaku konsumen muda.

Pada tahun 2013, mereka merilis laporan bertajuk Youth Mode: A Report on Freedom. Dari situlah istilah normcore muncul secara luas untuk pertama kalinya. Dalam laporan tersebut, mereka menulis dengan nada yang agak ironis, bahwa "normal"

sesungguhnya adalah bentuk keunikan baru. Di tengah dunia yang sibuk mengejar eksklusivitas dan keistimewaan, justru menjadi "biasa" adalah cara lain untuk menonjol.

Jauh sebelum itu, istilah normcore pernah muncul pada 2008 di komik web berjudul Templar AZ karya kartunis Ryan Estrada.

Dalam komiknya, Estrada menggambarkan kehidupan masyarakat di sebuah kota fiktif yang mengenakan pakaian polos, celana jeans, dan kaus biasa. Menariknya, gaya busana mereka sudah ketinggalan zaman, tiga tahun setelah masa tren, tetapi dianggap sebagai ciri khas gaya yang begitu mereka banggakan. Ironisnya, istilah itu kemudian dihidupkan kembali oleh K-Hole tanpa mereka sadari memiliki akar darisana. (ist, tir/dya)



Kunci Gaya Normcore

Warna Netral :

Hitam, putih, abu-abu, navy, beige, olive green.

Kenyamanan :

Hindari pakaian ketat, pilih potongan longgar dan bahan nyaman (katun, denim).

Unisex :

Banyak item bisa dipakai bersama (pria/wanita).

Fungsional :

Pilih pakaian yang praktis dan mudah dipadukan.

Tanpa Logo :

Hindari pakaian dengan logo merek yang mencolok untuk kesan "tanpa usaha".

Isyarat Gagalnya ...dari hal 1

Perjanjian perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia yang dicapai pada Juli 2025 lalu berisiko gagal. Ini terjadi karena Indonesia telah menarik kembali beberapa komitmen yang dibuatnya sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, kata seorang pejabat AS.

"Mereka (Indonesia) mengingkari apa yang telah kita sepakati pada Juli," kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian tentang komitmen spesifik apa yang sekarang dipertanyakan oleh Indonesia, dikutip dari Investing.com, Rabu (10/12/2025).

AS dan Indonesia pada Juli sepakat untuk menghapuskan tarif pada lebih dari 99 persen barang AS dan menghapuskan semua hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan AS. Sementara AS, akan menurunkan tarif impor pada produk Indonesia menjadi 19 persen dari 32 persen.

Presiden AS Donald Trump pertama kali mengumumkan kesepakatan tersebut pada 15 Juli, menyebutnya sebagai 'kemenangan besar' bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan produsen AS lainnya.

Pejabat Indonesia telah mengatakan kepada Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer dimana Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dan ingin merumuskannya kembali.

Para pejabat AS yakin hal itu akan mengarah pada kesepakatan yang lebih buruk bagi AS dibandingkan kesepakatan terkini yang telah dicapai dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia dan Kamboja.

Para pejabat AS meyakini Indonesia 'mundur' dalam upaya penghapusan hambatan non-tarif terhadap ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu perdagangan digital.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pekan lalu mengatakan, Indonesia menjadi sedikit 'keras kepala' dalam perjanjian dagangnya dengan AS, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, Malaysia telah terbukti menjadi aktor yang baik dan telah menghapus ribuan tarif sehingga perdagangan antara AS dan Malaysia berjalan jauh lebih lancar.

Sementara laman asing The Financial Times (FT) Rabu (10/12/2025) menuliskan, "Para

pejabat Washington berpendapat bahwa Jakarta mengingkari ketentuan perjanjian tersebut."

"Perwakilan perdagangan AS Jamieson Greer percaya Indonesia mundur dari beberapa komitmen yang telah dibuatnya," tulis laman tersebut lagi.

Laporan tersebut, mengutip sumber anonim. Tapi dikatakan ia mengetahui masalah tersebut.

"Para pejabat Indonesia dilaporkan enggan menyetujui beberapa komitmen yang mengikat yang dibuat dalam kesepakatan tersebut dan telah mengkomunikasikan hal itu kepada USTR (Kementerian Perdagangan AS)," tambahnya.

"Washington percaya Indonesia mundur dalam menghapus hambatan non-tarif terhadap ekspor industri dan pertanian AS serta janjinya untuk mengambil tindakan terkait isu perdagangan digital," tulisnya lagi.

FT juga menulis bagaimana sumber menyebut bahwa "Indonesia secara terang-terangan mengatakan mereka tidak dapat menerapkan apa yang telah mereka sepakati dan perlu menegosiasikan kembali komitmen awal agar tidak mengikat". Media itu menambahkan bahwa sumber mengatakan "sikap tersebut sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat, Indonesia mungkin berisiko kehilangan kesepakatannya".

Diterangkan pula bahwa ini bukan pertama kalinya Washington dan Jakarta mengalami gesekan terkait kesepakatan perdagangan. Pada bulan November, FT melaporkan bahwa Indonesia telah menolak klausul "racun" dalam kesepakatannya yang telah disetujui oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia.

"Klausul 'racun' mengancam untuk mencabut perjanjian perdagangan jika negara tersebut menandatangani kesepakatan saingan apa pun yang dianggap AS akan membahayakan kepentingan utamanya," tambahnya lagi.

Reuters menyebut, belum ada komentar dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait kabar ini.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia pada pertengahan Juli, memangkas tarif "timbang balik" menjadi 19% dari 32% yang telah diancamnya dalam "surat tarif" kepada negara tersebut pada awal bulan itu.

Trump mengatakan bahwa Indonesia telah "berkomitmen" untuk membeli produk energi AS

senilai US\$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US\$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Presiden AS juga mengatakan pada saat itu bahwa "Ekspor AS ke Indonesia harus bebas dari hambatan tarif dan non-tarif".

Indonesia Membantah

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, kelanjutan perundingan perdagangan antara Indonesia-AS terkait penurunan tarif resiprokal yang diberlakukan Trump tak mengalami kendala hingga berujung kegagalan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, kesepakatan perdagangan tersebut masih tetap berlangsung dan tidak ada permasalahan yang menyebabkan perundingan terancam batal.

Menurutnya, segala dinamika yang terjadi selama proses perundingan perdagangan antara kedua negara merupakan hal yang wajar. "Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Haryo menambahkan, pemerintah terus mendorong agar kesepakatan antara kedua negara dapat segera tercapai dan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. "Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," tukasnya.

Untuk diketahui, Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi kementerian yang bertanggung jawab atas kelancaran proses negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

Seperti diketahui, pada 15 Juli lalu Indonesia dan AS sepakat untuk menurunkan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen kepada barang-barang Indonesia yang masuk ke AS.

Penurunan tarif resiprokal tersebut dibarengi dengan Indonesia setuju untuk melakukan penghapusan tarif pada lebih dari 99 persen barang AS dan penghapusan seluruh hambatan non-tarif terhadap produk AS yang masuk ke RI.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun mencoba meredakan kekhawatiran publik dan angkat bicara soal situasi ini.

"Oh, enggak, semua masih proses negosiasi," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditanya soal kabar keretakan tersebut di Jakarta Theatre, Rabu (10/12/2025).

Pernyataan itu menegaskan, dari pihak Indonesia, pembicaraan dengan Washington masih berjalan, termasuk rencana kedatangan delegasi AS ke Indonesia.

"Kan itu bagian dari proses negosiasi," lanjut Budi, merujuk ke rencana kunjungan AS sebagai bagian dari pembahasan lebih lanjut.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan pemerintah agar melakukan langkah maksimal untuk memastikan isu batalnya kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS tidak menjadi kenyataan.

Menurutnya, jika tarif ekspor Indonesia ke AS benar kembali ke level 32%, dampaknya terhadap perdagangan dan stabilitas ekonomi Indonesia akan sangat signifikan.

"Semoga rumor kesepakatan batal tidaklah benar. Pemerintah perlu berupaya maksimal mencegahnya. Akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter," ujar Wijayanto, Rabu (10/12/2025).

Wijayanto bilang, posisi AS sangat strategis bagi kinerja perdagangan Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS mewakili sekitar 10% dari total ekspor nasional, dan menyumbang hampir 50% dari total surplus perdagangan Indonesia.

"Selain penting mendorong pertumbuhan ekonomi, surplus tersebut merupakan sumber aliran devisa penting bagi Indonesia. Apalagi neraca pembayaran kita mengalami pemburuan akhir-akhir ini," jelasnya.

Wijayanto menambahkan, bila Indonesia harus menghadapi tarif 32% sementara negara-negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina tetap menikmati tarif sekitar 20%, maka potensi trade diversion dan investment diversion akan sangat besar. Kondisi ini dapat mengalihkan arus perdagangan dan investasi dari Indonesia ke negara lain.

"Ekonomi kita bisa sangat terputuk. Perhitungan awal saya, pertumbuhan ekonomi berpotensi tergerus 0,1% hingga 0,2%," kata dia.

Tidak hanya itu, dampak yang tak kalah berat juga diperkirakan menekan nilai tukar rupiah. "Kita semua tahu, dalam satu tahun ini rupiah melemah terhadap 84,5% mata uang dunia," kata Wijayanto. (wid,kcm,tmo,tan/dya)

GUS YAHYA SOAL KIAI ZULFA JADI PJ KETUM PBNU: SECARA ATURAN TIDAK SAH

Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpandangan sekaligus menegaskan keputusan rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU tidak sah. Pihaknya juga bakal menggelar rapat pleno tandingan, pada Kamis (11/12/2025). Ada sejumlah hal yang dibahas, termasuk soal polemik kepengurusan PBNU saat ini.

Gus Yahya menyebut, rapat pleno yang digelar untuk menetapkan KH Zulfa Mustofa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

"Sebetulnya secara aturan, ya, tidak bisa dianggap ada, karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah," ujar Gus Yahya kepada wartawan.

"Makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada," jelas dia.

Gus Yahya juga menekankan bahwa rapat harian Syuriah PBNU tidak sah untuk memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum. Dengan begitu, pemilihan penggantinya lewat rapat pleno pun juga dianggap tidak sah.

"Kan sejak awal sudah dibicarakan bahwa rapat harian Syuriah tidak



berwenang memberhentikan mandataris dalam hal ini saya sebagai ketua umum," tutur dia.

"Kalau tidak berwenang, [terus] dilakukan kan ya tetap tidak bisa diterima, sehingga tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dieksekusi," terangnya.

Gus Yahya menyebut, bahwa penggantian dirinya dari kursi Ketum

PBNU hanya dapat dilakukan melalui forum Muktamar.

"[Pemilihan yang sah lewat] muktamar. Ini kan sebetulnya hal yang universal, ya, di mana-mana kan tidak ada mandataris organisasi bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi, kan tidak pernah ada," ucap Gus Yahya.

"Ini tentu hal yang universal

6 poin utama pelanggaran yang dituduhkan Gus Yahya kepada Rais Aam PBNU dalam surat resmi kepada Menkumham:

- **Putus komunikasi dengan Ketum**
Rais Aam dinilai memutus komunikasi dengan Gus Yahya selama Agustus–November 2025 dan menghalangi upaya mediasi, dianggap melanggar prinsip mahabab, ukhuwah, dan ittihad.
- **Gunakan laporan audit palsu**
Dalam Rapat Harian Syuriah 20 November, Rais Aam dituding memakai laporan audit palsu dan menyampaikan tuduhan tanpa memberi ruang klarifikasi kepada Ketum.
- **Paksa pemberhentian Ketum lewat forum Syuriah**
Rapat Harian Syuriah disebut dipakai untuk memaksakan pemberhentian Ketum secara tidak sah dan bertentangan dengan ART serta peraturan organisasi.
- **Surat edaran tak sesuai prosedur**
Surat edaran Syuriah hanya ditandatangani Wakil Rais Aam dan Katib, tidak memenuhi prosedur administrasi organisasi.
- **Klaim kepemimpinan tunggal PBNU**
Dalam konferensi pers 29 November, Rais Aam disebut mengklaim seluruh kepemimpinan PBNU berada di bawah kendalinya, bertentangan dengan pemisahan kewenangan Rais Aam–Ketum.
- **Rapat Pleno tanpa Ketum**
Rais Aam dinilai menggelar Rapat Pleno PBNU tanpa Ketua Umum, melanggar ART yang mensyaratkan kehadiran Ketum dalam rapat strategis.

sebetulnya. Semua orang tahu, di NU juga begitu, tidak ada aturan khusus tentang hal itu," paparnya.

Sebelumnya, para pengurus PBNU di bawah komando Rais Aam KH Miftachul Akhyar menggelar rapat pleno, Selasa (9/12/2025). Dari rapat itu, diputuskan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Kiai Zulfa akan bertugas sampai muktamar 2026 digelar.

Namun, keputusan ini ditentang kubu Gus Yahya. Sekjen PBNU versi Gus Yahya, KH Amin Said Husni, menilai bahwa hasil rapat itu lemah.

Sebab, sudah ada keputusan dari para kiai sepuh NU di Pondok Pesantren Tebuireng untuk tidak boleh ada penunjukan Pj sampai masalah pencopotan itu jelas.

"Soal Pj Ketum, kami sangat menyesalkan hal itu. Karena dawuh [pesan] para kiai sepuh waktu pertemuan di Tebuireng kan sudah sangat jelas. Beliau-beliau meminta agar jangan ada pembahasan dan penetapan Pj Ketum dulu sebelum masalah pemakzulan itu clear," kata Kiai Amin.

Dia juga mempertanyakan legitimasi dari hasil rapat itu. Sebab, yang hadir juga dinilai tidak kuorum. "Apalagi legitimasi acara di Sultan itu sangat lemah. Yang hadir hanya 50-an orang. Padahal anggota Pengurus Besar Pleno itu 200 lebih. Jadi hanya seperempat. Lemah banget legitimasinya," pungkasnya. (wid,ist,ini/dya)

Minta Kementerian Hukum Tak Lakukan Pengesahan

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kubu Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta Kementerian Hukum untuk tidak mengesahkan perubahan susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022–2027. Hal ini dilontarkan untuk menanggapi keputusan Rapat Pleno PBNU yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum organisasi kemasyarakatan itu.

Kubu ini - atau dikenal dengan Kelompok Kramat - menilai pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang diputuskan dalam Rapat Harian Syuriah pada 20 November 2025 tidak memiliki dasar hukum dan tidak sah. Hal tersebut dilayangkan kelompok Kramat kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui surat untuk menanggapi dinamika terkini persoalan di PBNU.

Pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris PBNU Najib Azca itu menyebutkan bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama Pasal 40 ayat (1) huruf e, Ketua Umum dipilih langsung oleh muktamirin

dalam Muktamar sehingga berkedudukan sebagai Mandataris Muktamar.

"Sebagai Mandataris Muktamar, Ketua Umum tidak dapat diberhentikan kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta harus diputuskan melalui Muktamar Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ART Pasal 74," demikian pernyataan di situs media resmi Nahdlatul Ulama, Rabu (10/12/2025).

Kubu PBNU juga menilai bahwa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 8 mengenai pemberhentian fungsionaris tidak dapat diterapkan terhadap Ketua Umum karena posisinya sebagai Mandataris Muktamar. Dengan dasar tersebut, mereka menilai keputusan Rapat Harian Syuriah yang memberhentikan Ketua Umum dinilai tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Mereka juga berdalih alasan pemberhentian yang disampaikan pihak Syuriah hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak melalui proses pembuktian yang benar.

Sebaliknya, kelompok kramat menyatakan terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rais Aam terhadap Muqaddimah Qanun Asasi, Khittah Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Kelompok kramat mengutip Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriah hanya mengikat pengurus harian Syuriah, sehingga Ketua Umum tidak terikat pada keputusan rapat tersebut.

"Atas dasar itu, kami dengan hormat memohon kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk tidak mengesahkan perubahan apa pun terhadap susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022–2027 hingga dihasilkannya kepengurusan baru melalui Muktamar NU yang sah, kredibel, dan bermartabat berdasarkan ketentuan AD/ART Nahdlatul Ulama," demikian bunyi pernyataan tersebut. (nui,ist,rls/dya)